

**DEVELOPMENTALISME EKONOMI DI PULAU GILI TRAWANGAN  
KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
(Studi Komparatif Konsep Pembangunan Antara Sistem Ekonomi Islam  
Dan Sistem Ekonomi Kapitalis)**

**Achmad Al-Muhajir SAM<sup>1</sup>, Supriyanto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki, [amsam7405@gmail.com](mailto:amsam7405@gmail.com)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, [supriyanto71984@gmail.com](mailto:supriyanto71984@gmail.com)

**Abstrak**

Ekonomi dan kebutuhan mendorong manusia untuk terus berkembang dalam memecahkan masalah tentang ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Masalah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan tidaklah hanya bersifat individu atau ditanggung secara pribadi, melainkan juga bersifat kolektif atau menjadi tanggungjawab bersama. Pemikiran tentang sistem apa yang dianggap tepat untuk suatu negara tidak henti-hentinya dilakukan. Sistem ekonomi yang baik tidak dapat ditentukan dengan ideologinya, karena setiap sistem ekonomi mengalami penolakan dari sistem lain. Selain nilai Kapitalis dan Sosialis yang sudah mengisi dunia perekonomian, Islam juga memberikan sumbangsih pemikiran ekonomi, bahkan jauh sebelum Adam Smith dengan kapitalismenya.

**Abstract**

Economics and needs encourage people to continue to develop in solving problems about the economy and to meet the needs in their lives. Economic problems and fulfillment of needs are not only individual or personally borne, but also collective or shared responsibility. Thought about what system is considered appropriate for a country without stopping done. A good economic system cannot be determined by its ideology, because every economic system experiences resistance from other system. In addition to the Capitalist and Socialist values which have filled the world economy, Islam also contributes to economic thinking, even before Adam Smith with his capitalism.

**A. Pendahuluan**

Ekonomi dan kebutuhan mendorong manusia untuk terus berkembang dalam memecahkan masalah tentang ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Ekonomi dan pemenuhan kebutuhan memaksa manusia membuat keputusan mengenai cara terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri dapat dimaknai dengan suatu kegiatan baik oleh individu maupun kelompok untuk menciptakan atau pun menggunakan barang atau jasa yang tentunya disandarkan kepada pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan kepada pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif yang tersedia, manusia perlu menentukan pilihan terbaik, termasuk di dalamnya adalah mengenai prinsip berekonomi dan sistem ekonomi yang dianggap baik dan tepat.

Gambaran di atas menegaskan bahwa masalah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan tidaklah hanya bersifat individu atau ditanggung secara pribadi, melainkan juga bersifat

kolektif atau menjadi tanggungjawab bersama. Dengan demikian, sebagaimana sesuatu yang bersifat kolektif, maka juga harus diselesaikan dengan kolektif pula. Berbicara tentang kolektivitas dalam ekonomi, maka kata sistem ekonomi akan masuk dalam pembicaraan. Sepintas, sistem ekonomi sosialis akan menjadi jawaban akan hal ini, namun jika memperhatikan makna kebersamaan, maka kebersamaan dalam hal ini tidak harus diartikan dengan tindakan yang sama dengan bersama-sama, melainkan dengan adanya kebersamaan dalam satu pemikiran untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, penyelesaian masalah kolektif dapat terselesaikan jika individu mendapat kebebasan dalam memenuhi kepentingan masing-masing yang akhirnya saling memenuhi antara individu yang satu dengan yang lainnya sebagaimana terpenuhinya kebutuhan antara pembeli dan pedagang.

Pemikiran tentang sistem apa yang dianggap tepat untuk suatu negara tidak henti-hentinya dilakukan. Sejauh ini, doktrin bahwa *The Wealth of Nations* yang digagas Adam Smith sebagai akar teori ekonomi dan paling sukses di dunia masih tertanam di kalangan akademisi. Hal ini terbukti dari buku-buku yang diajarkan masih berkiblat kepada kapitalisme yang tentunya disandarkan kepada Adam Smith. Sadar atau tidak, kapitalisme dengan hegemoni mata uang kartal telah menciptakan ketimpangan ekonomi, karena nilai tukar uang tentunya dikembalikan kepada pasar. Di sisi lain, penguasa pasar adalah yang memiliki modal. Dengan demikian, yang diuntungkan di dalam kasus ini adalah penganut paham kapitalis. Namun sekalipun demikian, ternyata yang diuntungkan pun bukan penganut kapitalisme secara umum, hanya beberapa saja yang sukses, sebut saja Amerika dan Jepang. Dengan demikian, kapitalisme tidak sepenuhnya menjawab pembangunan ekonomi. Di sisi yang bersebrangan, penganut paham sosialis pun yang memiliki cita-cita sama rasa sama rata, masih belum berkembang untuk menjawab pembangunan ekonomi, dengan kata lain, baik kapitalis murni maupun sosialis murni dianggap sudah tidak mampu berkembang.

Sistem-sistem ekonomi yang ciptakan manusia mempengaruhi hasil dari penyelesaian masalah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Sistem-sistem ekonomi menjadi jalan untuk mencapai tujuan bersama suatu negara yang disandarkan kepada nilai-nilai kebudayaan, pandangan politik serta ideologi negara. Dengan membandingkan sistem-sistem ekonomi yang ada, akan ditemukan perbedaan dari masing-masing sistem yang sama-sama bertujuan untuk kepentingan bersama dalam suatu negara, akan tetapi sistem ekonomi yang berhasil diterapkan di suatu Negara belum bisa dijadikan dasar bahwa sistem tersebut juga akan berhasil diterapkan di Negara lain, termasuk Indonesia. Sistem ekonomi yang baik tidak dapat ditentukan dengan ideologinya, karena setiap sistem ekonomi mengalami penolakan dari sistem lain, seperti sistem ekonomi kapitalis yang dianggap sukses di Barat dan Jepang ditolak oleh kalangan yang meyakini bahwa sistem sosialis sebagai sistem yang berprikemanusiaan.

Dalam menentukan tepat dan tidaknya suatu sistem, tentunya harus melalui observasi dan pendalaman teori dari semua sistem yang ada, termasuk sistem ekonomi Islam yang saat ini sudah memiliki daya tarik tersendiri dari kalangan pemikir ekonomi barat dan sistem ekonomi kapitalisme yang sudah membuktikan diri sebagai sistem yang sukses dan diterima banyak kalangan. Pendalaman teori sistem ekonomi tidak bisa hanya dilakukan kepada satu

sistem saja, karena perbandingan sistem ekonomi akan menentukan tepat tidaknya suatu sistem diterapkan. Perbandingan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan menggunakan setidaknya dua model dapat memberikan hasil lebih dari pada hanya terfokus kepada satu model saja. Terlebih dalam tulisan Eliade disaat mengulang ungkapan seorang filosof Goethe yang juga sempat disinggung Max Muller yang tertuang di dalam tulisan Daniel yakni “seseorang yang hanya tahu satu hal, berarti tidak tahu apa-apa”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Mantesa Mandareza yang dilakukan peneliti di pulau Gili Trawangan menunjukkan fakta bahwa keberadaan para wisatawan asing yang tertarik dengan ketenangan dan keindahan Pulau Gili Trawangan sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat setempat, namun sayang karena ketidak siapan masyarakat untuk bersaing menjadikan masyarakat harus rela menjadi pengikut pasar dan menjadi pembantu di “rumah sendiri”. Dalam hal moral, masyarakat yang bersentuhan langsung dengan lingkungan Pulau Gili Trawangan, justru mengikuti kebiasaan dan sikap yang ditunjukkan oleh pendatang dari luar yang secara kuantitas lebih banyak, namun untungnya masih bisa terkontrol sekalipun tidak sepenuhnya. Dalam hal kebudayaan, budaya yang dibawa dari luar Indonesia, Eropa terutama terlihat sukses berkembang di daratan Gili Trawangan, mulai dari pergaulan malam hingga *party* ala Eropa.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, selain nilai Kapitalis dan Sosialis mengisi dunia perekonomian, Islam juga memberikan sumbangsih pemikiran ekonomi, bahkan jauh sebelum Adam Smith dengan kapitalismenya. Teori atau konsep ekonomi yang digagas Islam memiliki kesamaan dengan kapitalisme dan sosialisme, namun dari segala aspek, Islam tidak mengambil mentah-mentah konsep yang dimiliki kedua sistem ekonomi tersebut, Islam selalu menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pijakan dasar dalam segala tindakan termasuk dalam hal ekonomi. Hal ini sesuai dengan konsep dasar Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya kesamaan konsep Islam dan Pancasila menjadikan konsep Islam layak dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia dan sebagai alternatif atau sistem pembanding untuk sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme.

Apapun sistem yang digunakan, ketika dihadapkan akan kebutuhan pembangunan ekonomi, maka pengkomparasian dari dua sistem atau lebih bisa menjadi jawaban dari ketepatan dan efisiensi dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, penulis memilih sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis dalam pembangunan ekonomi menjadi tema utama penulisan. Pengkomparasian kedua konsep pembangunan sistem tersebut, diharapkan memberi gambaran dalam pemecahan masalah pembangunan ekonomi.

## B. Kerangka Teori

Pembangunan Ekonomi dapat dipahami dengan segala bentuk usaha dalam hal ekonomi yang bertujuan mengembangkan perekonomian serta penambahan infrastruktur karena kemajuan perekonomian sehingga perusahaan semakin banyak dan taraf pendidikan semakin meningkat, dengan demikian, diharapkan lapangan kerja bertambah, pendapatan perkapita meningkat dan kesejahteraan menjadi nyata. Sedangkan ekonomi pembangunan adalah disiplin ilmu yang membahas tentang pembangunan di negara berkembang serta bagaimana langkah yang harus diambil.

Pembangunan adalah proses perubahan dari masyarakat tradisional agraris menuju industrial-modern. Dengan demikian, pembangunan dapat dipahami dengan perubahan tatanan hidup masyarakat yang terencana. Pemahaman lengkap ketika membahas mengenai pembangunan ekonomi dapat disederhanakan dengan peralihan masyarakat yang dilakukan dengan rencana menuju perbaikan sesuai konteks persaingan dan kebutuhan pada zamannya, sehingga pembangunan akan terus berlanjut seiring perubahan zaman, mulai dari masyarakat tradisional menuju industrialis, modern dan seterusnya.

Ekonomi pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan. Pembangunan di negara-negara berkembang pada pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda diantara mereka. Perbedaan ini telah menjadi paradigma atau pandangan yang mendunia dalam melaksanakan pembangunan.

Secara normatif, pembangunan dapat dimaknai dengan jalan yang menuntun menuju perubahan yang lebih baik. Dengan adanya pembangunan, diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Ketika membahas pembangunan dan kemudian dihadapkan dengan negara-negara dunia ketiga, maka hal lain yang harus dipertimbangkan adalah negara mana dan waktu pelaksanaannya, karena pembangunan tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang dianggap baik atau pun buruk secara historis suatu negara. Definisi universal sebagai wakil untuk semua wajah definisi tentang pembangunan ekonomi masih belum ada, namun masih ada kemungkinan diketemukannya jembatan dalam pemahamannya jika dilakukan pemilihan menurut deskripsi tujuan (objectives) dan proses (process) yang terkandung di dalam pembangunan ekonomi itu sendiri.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup. Proses pembangunan ekonomi adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan dan penataan kembali suatu ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi langkah awal menuju kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai dengan menggambarkan kejadian, menjelaskan sebab-sebab kejadian tersebut, memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya (dengan atau tanpa intervensi), dan berusaha untuk mengelola dan mengontrol terhadap perubahan pada semua level aktifitas masyarakat, hal ini mengacu kepada teori analisis dan realitas sosial yakni penjelasan, prediksi, control dan pengelolaan perubahan.

Mengenai indikator dan ukuran dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat atau ditandai dengan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan, kualitas sosial, dan indeks pembangunan sosial. Perincian dari indikator-indikator di atas sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Per Kapita

Negara dapat dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi jika pendapatan masyarakatnya secara rata-rata tinggi, hal ini dapat dilihat dari produktivitas setiap tahunnya dari suatu negara. Selain dapat dijadikan gambaran antara negara maju dan berkembang, pendapatan perkapita juga menjadi tolak ukur dari kesejahteraan masyarakatnya.

Tinggi rendahnya ekonomi masyarakat dapat dilihat dari produktifitas negara tersebut setiap tahunnya. Dalam pengukurannya, bahasa teknis ekonomi lebih dikenal dengan sebutan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Karena yang akan diukur adalah pendapatan negara yang tentunya jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya ialah berlainan, maka digunakanlah perhitungan perkapita PNB atau GNB. Dari rata-rata ini lah dapat dibedakan pembangunan dari suatu negara dengan negara lain, dalam artian negara yang setiap tahunnya memiliki PNB atau GNP US \$ 1000 lebih berhasil dalam pembangunan daripada negara yang hanya mencapai US \$ 750 setiap tahunnya.

## 2. Pemerataan Pendapatan

Bangsa atau negara bisa dikatakan sukses bukan hanya dengan melihat pendapatan perkapita atau produktivitas yang tinggi saja, namun lebih dari itu, alur pendistribusiannya juga harus merata. Jika yang menjadi ukuran pembangunan hanya rata-rata PNB atau GNP, maka kenyataan yang sebenarnya adalah belum tentu seluruhnya memiliki pendapatan yang baik, bisa jadi sebagian kecil justru terpuruk, hanya saja tertutupi oleh sebagian yang jaya perekonomiannya, konsekwensinya hitungan tersebut tidak bisa menjelaskan secara akurat keadaan ekonomi seluruh masyarakatnya.

Menyadari realita ini, maka perlu tamahan syarat suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan, yakni pemerataan pendapatan. Faktor ini sering terlupakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat terutama dalam perubahan dari waktu ke waktu. berdasarkan sejarah negara-negara maju, pada awal tahap pembangunan tampak menurun, namun pada akhirnya justru berhasil, namun hal ini sayangnya tidak sama dengan yang dihadapi negara berkembang. Dalam proses pembangunan justru negara sedang berkembang pendistribusian pendapatannya menjadi memburuk, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dan bertambahnya jumlah pengangguran.

Dalam proses menuju kesejahteraan masyarakat, tidak cukup hanya melihat produktivitas tinggi saja, namun juga pendistribusian pendapatan yang merata serta keadaan masyarakat dibawah garis kemiskinan perlu diperhatikan, karena tidak semua negara yang berhasil dalam GNP berhasil juga dalam pemerataan pendapatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara yang berhasil dalam pembangunan adalah negara yang baik dalam produktivitas, baik juga dalam pemerataan pendapatan.

## 3. Kualitas Sosial (Kualitas Hidup)

Tingkat harapan hidup juga harus diperhitungkan, karena jika penilaiannya hanya pada pendapatan dan pemerataan, maka pembangunan ekonomi hanya sebatas kekayaan materil, sedangkan tujuan dari kekayaan materil tersebut tidak tercapai.

Untuk mengukur kualitas harapan hidup dapat dilihat dari tiga indikator, yakni tingkat harapan hidup setelah usia satu tahun, jumlah kematian dan jumlah melek huruf. Untuk harapan hidup, angka 100 diberikan jika rata-rata harapan hidup mencapai 77 tahun dan angka satu jika rata-rata hidup hanya 28 tahun. Untuk jumlah kematian bayi, angka 100 diberikan jika 9 dari 1000 rata-rata kematian bayi dan angka 1 diberikan jika

rata-rata kematian mencapai 229. Untuk indikator ketiga, angka 100 diberikan jika rata-rata melek huruf mencapai 100% dan sebaliknya.

#### 4. Pembangunan Sosial

Hal lain yang menjadi tolak ukur pembangunan sukses adalah indeks pembangunan sosial, karena dengan indeks pembangunan sosial menciptakan perbedaan yang tidak terlampaui jauh dengan negara maju. Terdapat 16 indikator utama dalam pembangunan sukses, 7 indikator ekonomi dan sisanya indikator sosial. Berikut ini perincian indikatornya:

- a. Tingkat harapan hidup.
- b. Persentase penduduk yang hidup di pusat-pusat pemukiman yang dihuni oleh 20.000 jiwa atau lebih.
- c. Konsumsi protein hewani per kapita setiap hari.
- d. Tingkat pencapaian pendidikan dasar dan lanjutan.
- e. Rasio pendidikan keterampilan.
- f. Jumlah rata-rata penghuni per kamar.
- g. Sirkulasi surat kabar per seribu penduduk.
- h. Persentase penduduk yang secara ekonomis aktif atau memiliki akses terhadap aneka fasilitas sosial dasar seperti listrik, gas, air bersih dan sebagainya.
- i. Produksi pertanian per tenaga kerja pria dewasa.
- j. Persentase pekerja pria dewasa dalam sektor pertanian.
- k. Konsumsi listrik(kilowatt) per kapita.
- l. Konsumsi baja (kilogram) per kapita.
- m. Konsumsi energi batu bara per kilogram.
- n. Persentase sumbangan sektor manufaktur terhadap GDP.
- o. Perdagangan luar negeri per kapita.
- p. Persentase penerima gaji dan upah terhadap jumlah penduduk yang aktif secara ekonomis.

Bagi Indonesia sendiri sudah ada kebijakan yang mengatur dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 (Tap MPR No. IV/MPR/1999) ditetapkan arah kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, diantaranya:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah untuk melakukan regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan.
4. Mengembangkan kehidupan yang layak, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan secara maksimal sektor-sektor unggulan setiap daerah.
6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis.
7. Mengembangkan kebijakan fiskal.
8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparansi dan efisien.

9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri untuk kegiatan ekonomi produktif.
10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi.
11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien dan produktif.
12. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, dan profesional.
13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi dan Badan Usaha Milik Negara.
14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal.
15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah.
16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara transparan dan produktif.
17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik, dan air bersih.
18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu.
19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga kerja.
20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi bangsa sendiri.
21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna meningkatkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengurangi defisit negara melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, dan pinjaman luar negeri secara bertahap.
24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta.
25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan.
26. Melakukan negosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan lainnya, dan negara donor.
27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor.
28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum.

Beberapa arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tersebut merupakan rangkaian upaya pembangunan sektor ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia untuk keluar dari keterpurukan ekonomi.

Secara umum, indikator dan ukuran dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat atau ditandai dengan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan, kualitas sosial, dan indeks pembangunan sosial. Suatu negara dapat dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi jika pendapatan masyarakatnya secara rata-rata tinggi, hal ini dapat dilihat dari produktivitas setiap tahunnya dari suatu negara. Selain dapat dijadikan gambaran antara negara maju dan berkembang, pendapatan perkapita juga menjadi tolak ukur dari kesejahteraan masyarakatnya.

Bangsa atau negara bisa dikatakan sukses bukan hanya dengan melihat pendapatan perkapita atau produktivitas yang tinggi saja, namun lebih dari itu, alur pendistribusiannya juga harus merata. Selain itu, tingkat harapan hidup juga harus diperhitungkan, karena jika penilaiannya hanya pada pendapatan dan pemerataan, maka pembangunan ekonomi hanya sebatas kekayaan materil, sedangkan tujuan dari kekayaan materil tersebut tidak tercapai. Untuk mengukur kualitas harapan hidup dapat dilihat dari tiga indikator, yakni tingkat harapan hidup setelah usia satu tahun, jumlah kematian dan jumlah melek huruf. Sedangkan hal lain yang menjadi tolak ukur pembangunan sukses adalah indeks pembangunan sosial, karena dengan indeks pembangunan sosial menciptakan perbedaan yang tidak terlampau jauh dengan negara maju.

Secara garis umum, Islam dengan Al-Qur'an mengkonsepkan tiga konsep dasar yakni akidah, syari'ah dan akhlak sebagai aspek dasar dalam semua aktifitas, termasuk dalam berekonomi. Dalam dimensi akhidah, teori menawarkan dua dimensi utama yakni, *uluhiyah* dan *rabbaniyah* dan diredaksi lain ditambahkan pula *asma' wa shifat*. *Uluhiyah* berarti menjalankan segala aktifitas ekonomi dalam rangka mengesakan Allah, sedangkan *rabbaniyah* berarti aktifitas ekonomi manusia ditujukan agar membentuk kemaslahatan manusia dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Tambahan aspek *asma' wa shifat* berposisi sebagai penghayatan aktifitas ekonomi, maksudnya semua yang ada di dunia adalah milik Allah dan manusia mendapatkan amanah menjaga dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia.

Selain mengenai akidah, syari'ah dan akhlak. Syari'ah berarti segala aturan dalam ekonomi Islam ditegakkan untuk menciptakan kemaslahatan dan meminimalisir kerusakan, sedangkan akhlak berarti menegakkan etika dalam ekonomi dengan cara mentransformasikan etika transendental dalam aktifitas ekonomi.

Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan: "*a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*" (pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Dalam Islam, pembangunan ekonomi dilandasi dengan ketauhidan, keadilan dan *khilafah*. Dengan ketauhidan, pembangunan ekonomi yang diusahakan akan selalu mengacu



kepada Tuhan yang menciptakan sumberdaya dan Tuhan yang memberikan pertolongan dalam setiap usaha pembangunan ekonomi. Dalam hal keadilan, manusia dituntut agar selalu moderat dalam menetapkan regulasi dan bertransaksi, sehingga tidak ada yang terdzhalimi dan tidak ada yang mendzalimi. Dalam hal *khilafah*, manusia digariskan agar tetap menjaga posisi sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga apapun yang dilakukan demi pembangunan ekonomi, tidak sampai merusak keseimbangan bumi. Selain ketiga prinsip dasar yang dikemukakan oleh Umer Chapra, dalam redaksi lain ditambahkan dengan prinsip *tazkiyah* dan *falah*. Dengan prinsip *tazkiyah*, manusia diingatkan agar setiap keputusan yang diambil, agar selalu tetap pada kesucian diri, dalam artian pembangunan atau perubahan yang dilakukan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, melainkan juga kepentingan lain secara umum. Sedangkan prinsip *falah* menegaskan bahwa keuntungan yang diraih di dunia tidaklah berharga jika dibandingkan dengan kepentingan yang akan didapatkan di akhirat, sehingga pembangunan yang dilakukan tetap memperhitungkan keuntungan hari akhir.

Secara rinci, Khurshid Ahmad merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islam sebagai dasar-dasar filosofis pembangunan yang Islami yakni tauhid termasuk (di dalamnya *rububiyah*, *uluhiyah* dan *asma wa shifat*), *khalifah* dan *tazkiyah* dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Tauhid

Dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam tidak boleh terlepas dari tauhid, karena tauhid menjadi fondasi utama ajaran Islam serta menjadi dasar konsep aktivitas dalam Islam, baik itu di bidang ibadah, maupun ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi agar selalu bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang diajarkan Allah dan bermuara kepada ketakwaan kepada Allah. Dari tauhid pula lahir kemaslahatan, keadilan dan persaudaraan.

Prinsip ini memiliki banyak bentuk dalam teorinya, yakni *rububiyah*, *uluhiyah* dan *asma wa shifat*. *Rububiyah* dipahami dengan pentauhidan Allah dalam bentuk perbuatan-Nya seperti mencipta, menurunkan rezeki dan sebagainya. Dengan prinsip ini, diharapkan dapat memberi kesadaran kepada setiap orang akan keberadaan Allah dengan perbuatan-Nya, sehingga, setiap aktivitas ekonomi melahirkan etika yang luhur.

Kedua adalah *uluhiyah*. *Uluhiyah* dapat dipahami dengan sikap penghambaan seorang kepada Allah, dengan kata lain, prinsip ini mengajarkan manusia untuk menyadari posisinya sebagai hamba yang harus selalu taat dan patuh terhadap Tuhannya. Dengan terciptanya penghambaan ini, maka konsekwensinya adalah setiap aturan perekonomian yang digariskan Allah tidak akan dilewati sehingga akhirnya menciptakan tatanan pasar yang beretika dan bernaftaskan Islami.

Terakhir adalah *asma wa shifat*. Prinsip ini mengajarkan keyakinan akan nama dan sifat Allah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits tanpa dimodifikasi baik secara makna kata atau pun pemahaman makna. Dengan demikian, dalam menjalankan seluruh aktifitas menjadi terarah tanpa spekulasi logika dan kepatuhan menjadi harga mati.

#### 2. Khalifah

Dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa manusia dijadikan wakil Allah di Bumi. Hal ini tertuang dalam surah al-an'am, tepatnya ayat 165.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku menjadikan di dalam bumi seorang *khalifah*.

Dalam penafsiran ayat pengangkatan manusia sebagai khalifah tersebut cukup beragam, di antaranya: pertama, Allah memilih manusia sebagai pengelola bumi setelah sebelumnya jin dianggap gagal mengelola bumi dengan banyak melakukan kerusakan dan saling menumpahkan darah. Kedua, suatu generasi akan digantikan oleh generasi lain setelah mereka, demikian seterusnya hingga hari kiamat. Ketiga, manusia sebagai pemimpin di bumi yang diharapkan menata dan mengelola bumi dengan baik dan saling tolong menolong. Terakhir, umat manusia sebagai umat terakhir yang menggantikan umat-umat terdahulu. Dengan amanah sebagai khalifah ini, manusia memiliki tanggungjawab untuk memberdayakan bumi dengan semaksimal mungkin demi terciptanya kesejahteraan seluruh manusia di bumi.

Prinsip ini mengajarkan agar manusia selalu ingat dengan posisinya sebagai wakil Allah di bumi yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di bumi termasuk dalam pembangunan ekonomi. Melalui prinsip ini, Manusia harus selalu berposisi sebagai wakil Tuhan. Sebagaimana semua wakil, maka manusia harus menggantikan posisi yang tidak ditempati oleh yang diwakili, dengan demikian, semua tanggungjawab dilimpahkan kepada manusia yakni menjaga dan memperbaiki bumi. Dengan kata lain, dalam pembangunan ekonomi, menurut konsep Islam, manusia harus memperhatikan keadaan lingkungan dan peradaban manusia, bukan hanya tentang keuntungan saja.

Nilai khalifah juga mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah dalam mengatur interaksi antar kelompok, sehingga kekacauan dapat dihindari atau dikurangi, selain itu juga, prinsip khalifah berperan dalam memastikan agar pelanggaran hak-hak manusia tidak terjadi.

### 3. *Tazkiyah*

Prinsip ini mengajarkan akan pensucian manusia kepada Allah agar tidak ternoda dengan kerusakan, keegoisan dan kedhaliman. Dalam hal pembangunan ekonomi, prinsip ini mengajarkan akan keadilan dan kejujuran. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa Allah hendak menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara. Selanjutnya, Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari tazkiyah adalah falah, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat. Prinsip falah ini mencakup aspek-aspek kehidupan secara keseluruhan, baik spiritualitas, moralitas, ekonomi, dan yang lainnya, baik yang mampu dicapai dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan prinsip ini, termuat seluruh aspek lain seperti akidah, akhlak, kemanusiaan, dan kemoderatan dalam perilaku ekonomi secara khusus maupun seluruh aspek kehidupan secara umum.

### C. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bogdan dan Boklen di dalam bukunya Ulfatin, mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Menurut David Williams dalam buku Moleong J.Lexy, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.

Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengungkap suatu fenomena yang terjadi dengan apa adanya yang bersifat alami yang menghasilkan data diskriptif berupa kata tertulis melalui metode yang sistematis, terarah dan dapat di pertanggung jawabkan.

### D. Pembahasan

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, analisis dari perpaduan antara fakta dan teori, dapat didapatkan pembahasan yang lebih sederhana namun rinci.

#### 1. Implementasi Konsep Ekonomi

##### a. Implementasi Nilai Islam Dalam Ekonomi

Ajaran atau batasan Islam dalam kehidupan manusia adalah seperti rambu-rambu lalu lintas yang mengatur jalan kehidupan manusia. Bagaimanapun keadaan yang dihadapi manusia harus selalu disandarkan kepada ajaran Islam.

Pulau Gili Trawangan yang kebanyakan penghuninya adalah para pengunjung dari berbagai negara, budaya dan bahasa. Dengan fakta ini masyarakat muslim memiliki tantangan baru dalam menjalani aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang selalu terjadi setiap harinya.

Islam memberikan batasan dari kebebasan beraktifitas berekonomi dengan konsep ketauhidan, kekhalifahan, tazkiyah dan falah. Ketauhidan mengajarkan kesadaran akan Dzat Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Esa, dengan kekhalifahan mengajarkan nilai ketuhanan yakni menjaga bumi dengan keseimbangan, sedangkan *tazkiyah* dan *falah* mengajarkan kesucian harta dari semua bentuk kesalahan dalam menuai keuntungan sehingga pada gilirannya mendapat keuntungan tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat.

Melihat hasil dari penerapan nilai Islam dalam berekonomi di pulau Gili Trawangan yang tetap bisa bersaing, maka seharusnya seluruh komponen masyarakat muslim bisa menerapkan hal yang sama terlebih di daerah lain yang mayoritas muslim sebagai konsumennya. Hal ini terjadi karena produk yang ditawarkan oleh Islam tidak memberikan mudharat bagi siapapun dan dapat diterima disemua kalangan, sehingga

secara metematis pun produk dengan memegang teguh nilai Islam tetap bisa bersaing bahkan dapat menjangkau tidak hanya kepada konsumen muslim, tapi lebih dari itu.

Dalam pembangunan ekonomi pula sangat membantu, dengan nilai ketauhidan, kekhalifahan, *tazkiyah* dan *falah*, semua orang memiliki peluang untuk mendapat keuntungan melalui kerjasama yang sehat dan saling menguntungkan, dengan demikian, pemerataan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita mudah didapatkan.

#### b. Implementasi Nilai Kapitalis Dalam Ekonomi

Penerapan nilai kapitalis masih mudah untuk ikuti, namun dengan basis modal saja membuat pengusaha menjadi mudah gulung tikar jika tidak kuat secara modal, baik modal materil maupun kemampuan atau *skill*.

Secara umum, penerapan kapitalis sangat sukses dalam menjalankan usaha sebagaimana yang dialami pengusaha-pengusaha hiburan dan penginapan bebas. Namun secara teoritis, persaingan yang diajarkan dalam usaha sangat terlihat efeknya, dengan banyaknya persaingan, harga pasar ikut bersaing, pelayanan dan modal ikut menjadi penentu kesuksesan dalam persaingan.

Kebebasan dalam persaingan pasar sangat berimbas kepada cara bersaing. pengontrolan dari pihak pemerintah yang tidak sepenuhnya mampu menjangkau dan membiarkan pasar sesuai keinginan pelaku pasar sangat beresiko kepada kecurangan dan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi perkapita, namun baiknya dengan adanya persaingan demikian, pertumbuhan ekonomi dan etos kerja pelaku ekonomi menjadi lebih baik, sehingga berimbas pula kepada perbaikan pelayanan setiap usaha, perbaikan infrastruktur bahkan melalui inisiatif pengusaha, dan perbaikan perputaran uang dari semua negara yang datang menjadi lebih lancar.

### 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Nilai Islam dan Kapitalis

Kesadaran dan lingkungan adalah dua komponen penting dalam suatu perubahan. Kesadaran pribadi akan mudah tergoyahkan jika berada di lingkungan yang tidak mendukung, demikian pula sebaliknya, kesadaran tidak akan tumbuh jika lingkungan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Penerapan nilai Islam maupun kapitalis dalam aktifitas ekonomi akan ditentukan oleh banyak faktor termasuk di dalamnya faktor internal yakni kesadaran dan eksternal yakni lingkungan. Berikut analisis yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pulau Gili Trawangan.

#### a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai Islam

Usaha menerapkan nilai Islam secara berkelanjutan dan jangka panjang, di pulau Gili Trawangan sudah dimulai dengan adanya alumni pesantren yang tetap menjaga nilai Islam sekalipun dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat.

Lingkungan pulau Gili Trawangan adalah lingkungan yang penuh dengan kebebasan baik kebebasan dalam bergaul, berpakaian maupun berbicara. Tantangan unik menunggu masyarakat muslim yang harus tetap berada dalam gari batasan syariat seperti menjauhi bertransaksi dengan suatu yang dilarang, menjauhi pergaulan yang

menimbulkan kerusakan moral maupun fisik serta istiqomah menjalankan perintah dalam batasan syariat.

Kesadaran akan nilai Islam dalam seluruh aktifitas, pengaruh pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran serta menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kehendak syariat adalah kendala yang harus dihadapi masyarakat muslim di pulau Gili Trawangan. Menumbuhkan kesadaran tidaklah mudah ketika dihadapkan dengan lingkungan yang sedemikian bebas sehingga pengaruh dari orang tua dan guru menurut peneliti sangat terganggu dan kemungkinan akan kalah besar pengaruhnya dengan lingkungan yang didapatkan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai Kapitalis

Banyaknya pendatang dari berbagai daerah memberikan peluang besar kepada pengusaha di pulau Gili Trawangan, namun di sisi lain, banyaknya pengusaha ikut memberikan pengaruh yang menghambat pertumbuhan ekonomi perkapita, dikarenakan semakin banyak pengusaha, semakin banyak “perang pasar” yang dihadapi, semakin banyak “perang pasar” yang dihadapi maka semakin kecil kemungkinan untuk memperbesar keuntungan, ditambah lagi jika cara yang ditempuh pesaing lebih baik dan mungkin lebih kasar, tentu keadaan demikian akan membuat hambatan tersendiri bagi pengimplementasian nilai Kapitalis murni di pulau Gili Trawangan.

E. Simpulan

Sebelumnya peneliti telah menjelaskan secara terperinci mengenai nilai Islam dan Kapitalis. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi nilai Islam dan Kapitalis yaitu:

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Nilai Islam

Faktor yang didapatkan dari data dan informasi serta hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kesadaran akan nilai Islam, pengaruh orang tua dan lingkungan menjadi sangat signifikan pengaruhnya dalam pengimplementasian nilai dari konsep Islam dalam aktifitas ekonomi.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi nilai Kapitalis

Faktor yang menjadi perhatian dari pengusaha Kapitalis di pulau Gili Trawangan adalah bertambahnya pengusaha dan fanatisme agama bagi masyarakat muslim.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Khurshid. *Economic Development in an Islamic Framework* dalam Studies Islamic Economics Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 1993.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta:Kharisma Putra Utama Offset, 2010.

- Fahmi, Abu dkk. *HRD Syari'ah Teori dan Implementasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Husein, Makchnum. *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Jalil, Abdul. *Teologi Buruh*, Yogyakarta: PT.LkiSPelangiAksara, 2008
- Jhingan, *Ekonomi pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Kaf, Abd. Allah Zaki Al-. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Karim, Adiwarmans Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Komaruddin, *pengantar Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Angkasa 1985.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso. *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kuncoro, Mudjarat, *Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian*, Jakarta: Pranada Media Group, 2011.
- Purtanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi & Makroekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Rivai, Viethzal dkk. *Islamic Business And Economic Etics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Seda, Fans. *Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Indonesia, 1996.
- Setiawan, Bonnie. *Peralihan Ke Kapitalisme Dunia Ketiga: teori-teori Radikal Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Swasono, Edi. *Ekspose Ekonomi Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-Bebas*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep)-UGM, 2010
- Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.

- Ubaidillah, U. (2023). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI'ISTIGHLAL SEBAGAI SOLUSI PEREKONOMIAN KONTEMPORER. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1), 157-154.
- Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kuantitatif Di Bidang Pendidikan : Teori dan Aplikasinya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014.